

SKRIPSI

**MODALITAS INDAH PUTRI INDRIANI DALAM PILKADA LUWU
UTARA TAHUN 2020**



Oleh:

YUSRIL HAS

NIM: 105641107418

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTASA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**MODALITAS INDAH PUTRI INDRIANI DALAM PILKADA LUWU
UTARA TAHUN 2020**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan diusulkan oleh :

YUSRIL HAS

105641107418

**JURUSAN ILMU ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Modalitas Indah Putri Indriani Dalam Pilkada Luwu

Utara Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Yusril Has

Nomor Induk Mahasiswa : 1056411107418

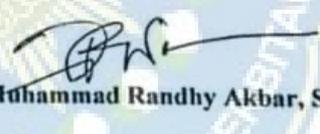
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

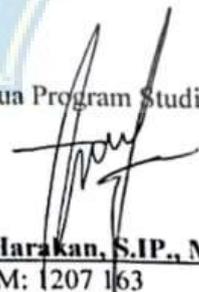
Pembimbing II


Hardianto Hawing, S.T., M.A


Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui:


Dekan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
Dr. Hj. Hryanti Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Ketua Program Studi
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 1207163

NBM: 730 727

NBM.1207 163



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 022A/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari senin, 29 Januari 2024

Mengetahui :

Dekan

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji

1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si ()
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si ()
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ()
4. Muhammad Randhy A, S.IP., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yusril Has

Nomor Stambuk : 105641107418

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 30 Januari 2024

Yang menyatakan



Yusril Has

ABSTRAK

Yusril Has. 2023. Modalitas Indah Putri Indriani Dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020 (dibimbing oleh Hardianto Hawing dan Muhammad Randy Akbar).

Penelitian ini bertujuan untuk Modalitas Indah Putri Indriani Dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki Indah Indah Putri Indriani pada Pilkada 2020 adalah, pertama interaksi sosial dengan masyarakat, Indah Indah Putri Indriani aktif dalam kegiatan dengan masyarakat. Kedua latar belakang pendidikan dan organisasi. Ketiga jaringan sosial atau relasi yang dimiliki sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas dukungan dalam pemenangan pilkada di Kabupaten Luwu Utara. Modal ekonomi yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencalonannya dalam pilkada di kabupaten Luwu Utara. Modal ekonomi Indah Putri Indriani yang begitu besar mampu memengaruhi kerja-kerja para relawan dan tim pemenangan lebih produktif dalam melakukan sosialisasi dan konsolidasi dukungan terhadap Indah Putri Indriani. Modal simbolik berupa popularitas dan dukungan partai dan tokoh agama. Popularitas dan elektabilitas Indah Putri Indriani bukan hasil dari spontanitas selama satu atau dua bulan di Kabupaten Luwu Utara melainkan juga dari hasil dari jerih payah yang dilakukan. Dukungan partai dan tokoh agama kepada Indah Putri Indriani menjadikannya unggul. Terbukti bahwa modal popularitas membawa selangkah lebih maju dibandingkan calon-calon lainnya. Modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani seperti latar belakang keluarga ataupun penghargaan-penghargaan atas prestasinya itu kemudian mampu dijadikan sebagai *brand marketing* pada saat sosialisasi dan saat kampanye, sehingga modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani dianggap mampu memengaruhi calon pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020. Sehingga Indah Putri Indriani berhasil mengakumulasikan modalitas yang dimilikinya seperti modal sosial, ekonomi, simbolik dan budaya.

Kata kunci: Modalitas, Indah Putri Indriani, Pilkada.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahma, dan hidayah Nya kepada kami, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Modalitas Indah Putri Indriani Dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020”.

Adapun skripsi ini dibuat merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan srata 1 (S1) pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus kepada yang terhormat:

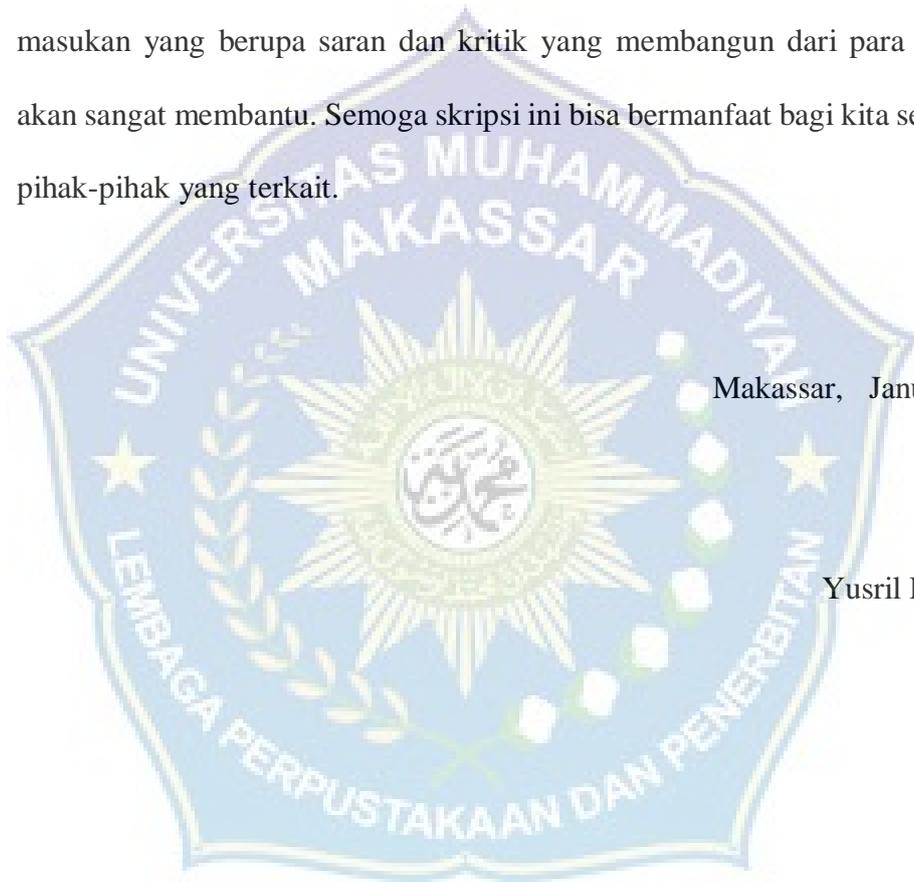
1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Hardianto Hawing, ST., MA**, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Muhammad Randy Akbar, S.IP., M.Si**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan seluruh Staff pengasuh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuannya dalam pengurusan skripsi selama ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan yang berupa saran dan kritik yang membangun dari para pembaca akan sangat membantu. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang terkait.

Makassar, Januari 2024

Yusril Has



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	13
C. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data	35
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisa Data	37
G. Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
B. Modalitas Indah Putri Indriani Dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik	45
Tabel 4.4 Jumlah Pemilih.....	46
Tabel 4.5 Data Pemilih Tetap Pada Pemilu pada Luwu Utara Tahun 2020	53
Tabel 4.6 Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Kab. Luwu Utara Tahun 2020.....	54
Tabel 4.7 Dukungan Partai Politik Indah Putri Indriani Pemilu 2020.....	62
Tabel 4.8 Harta Kekayaan Indah Putri Indriani.....	62
Tabel 4.9 Latar Belakang Keluarga Indah Putri Indriani.....	65
Tabel 4.10 Penghargaan Indah Putri Indriani.....	66
Tabel 4.11 Modalitas Indah Putri Indriani	69



DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Fikir	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Formsof Discrimination Againts Women*), menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kewajiban negara untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. (Wibowo, 2017).

Indonesia untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung setelah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 melalui proses pengesahan DPR. Perubahan mekanisme pilkada tersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berjalan dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).

Menang dalam persaingan politik merupakan salah satu variabel pemenang akumulasi modalitas. Secara konseptual, analogi tersebut diwujudkan dari tiga aset utama yang dimiliki oleh calon yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan langsung. Keempat modal tersebut adalah modal politik, modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi. Pasangan calon yang mampu mengumpulkan empat modal, mereka dapat eksis secara independen, tetapi secara umum,

keempat modal biasanya terkait. Pendekatan modalitas dalam kontestasi politik sendiri merupakan model untuk memenangkan kompetisi elektoral berdasarkan modalitas yang dimiliki (Irsat, 2018).

Modalitas merupakan sumber daya, dimana sumber daya tersebut telah dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu ranah. Kemudian sama-sama diketahui bahwa pada sebelumnya sudah dibekali oleh modal sosial yang cukup besar didapatkan, Indah Putri Indriani juga sudah diketahui oleh masyarakat Luwu Utara sebagai petahana. Temuan membuktikan bahwa sinergitas dari berbagai modalitas sangat signifikan menentukan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik dan sekaligus memberi beban politik berbiaya tinggi bagi para kontestan (Tokan, 2019).

Pilkada 2020, elit politik mensosialisasikan program yang akan dilakukan apabila terpilih sebagai kepala daerah. Visi, misi dan program kandidat kepala daerah berangkat dari dua kecenderungan utama, yakni fenomena sosial masyarakat yang sedang terjadi dan imajinasi elite mengenai transformasi masa depan daerah. Visi ideal mengenai masyarakat serta realitas politik yang dihadapi merupakan titik temu antara yang idealitas dengan yang praktis.

Pilkada secara langsung yang telah diselenggarakan sejak tahun 2005 dan pemilihan serentak yang dilakukan pertama kali pada tahun 2015 merupakan upaya untuk menghasilkan kepemimpinan daerah dan memupuk demokrasi. Kualitas demokrasi akan ditentukan oleh proses pemilihan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pilkada secara langsung sebagai suatu mekanisme untuk mewujudkan

kedaulatan rakyat sebagaimana amanat konstitusi, hak rakyat dalam menentukan kepemimpinan, rakyat pula yang dapat melakukan seleksi terhadap kandidat, bahkan rakyat dapat memilih pemimpin alternatif dari calon yang tidak diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu, yakni kandidat yang muncul melalui calon perseorangan. Pilkada merupakan sarana untuk menciptakan demokrasi dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat pemilih dalam menentukan pemimpinnya. Sistem demokratis, preferensi warga secara adil diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan dan terefleksi dalam hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan disebut demokrasi tidak hanya dilihat dari kemampuan elite untuk merespon aspirasi warganya, tetapi kepemimpinan tersebut harus dihasilkan dari satu proses pemilu yang dilakukan secara periodik, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Jurdi, 2021).

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dilakukan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Salah satu dari beberapa daerah yang mengikuti pilkada serentak yaitu Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan kepala daerah tersebut diikuti oleh tiga pasangan kandidat calon bupati. Ketiga pasangan kandidat calon bupati yakni Muh. Thahar dan Rahmat Laguni memperoleh dukungan sebanyak tiga partai yaitu Partai Nasdem, Perindo, dan Partai PKB.

Pasangan Indah-Suaib mendapatkan dukungan dari lima partai yaitu Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PDIP dan PPP, dan pasangan Arsyad Kasmar

dan Andi Sukma mendapatkan dukungan dari tiga partai yaitu Hanura, Gerindra dan PKS. Pilkada yang berlangsung tersebut kemudian di menangkan oleh pasangan nomor urut dua yakni Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur.

Hal ini berdasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020. Hasil dari perolehan suara pada pilkada kabupaten Luwu Utara sebagai berikut: pasangan calon nomor urut 02 Indah Putri Indriani bersama Suaib Mansur dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Calon yang diusung Partai Golkar, PAN, Demokrat, PDI-P dan PPP mendapatkan 80.078 atau 45,13 persen suara. Sementara pasangan nomor urut 01 Muh. Tahar Rum bersama Rahmat Laguni yang diusung partai Nasdem, PKB dan Perindo mendapatkan suara sebanyak 49.819 atau 28,08 persen, sedangkan pasangan calon nomor urut 03 yang diusung partai Gerindra, Hanura dan PKS, Arsyad Kasmar bersama Andi Sukma memperoleh, 47.515 suara atau 26,78 persen.

Dari data diatas Indah Putri Indrini mendapatkan hasil perolehan suara yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan kandidat yang lainnya dan memenangkan pilkada dengan perolehan suara 80.078 suara. Perlu penerapan strategi yang optimal dan pendekatan dengan masyarakat tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang kemenangannya. Penerapan strategipun dilakukan oleh seluruh tim yang terlibat dalam tim kemenangan seperti tim sukses yang telah dibentuk sebelumnya oleh kandidat serta partai pengusung dan tokoh masyarakat (Ariana, 2020).

Calon petahana paling banyak terdapat di pilkada kabupaten/kota yakni calon petahana bupati dan wakil bupati berjumlah 106 orang. Serta calon gubernur dan wakil gubernur petahana sebanyak 13 orang. Peningkatan partisipasi calon petahana tentu didasarkan pada kalkulasi peluang kemenangan.

Peluang tersebut dapat diukur melalui kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan, capaian program pembangunan, politisasi birokrasi, sampai pada kesiapan dari aspek finansial petahana sebagai konsekuensi tingginya biaya demokrasi langsung (*direct democracy*) pada momen pilkada. Selain itu, pragmatisme partai politik untuk tidak mengambil resiko mendukung kandidat yang berpeluang kalah adalah faktor yang tidak dapat dikesampingkan.

Tolak ukur lainnya ialah menguatkan *public trust* (kepercayaan publik) terhadap kinerja petahana. Kemudian adanya potensi manipulasi pilkada oleh kepentingan memenangkan petahana, sebab didukung oleh kelemahan dalam aturan pada proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu karena itu, secara konseptual menyiratkan bahwa ada beberapa potensi-potensi yang dapat dieksplorasi dan eksploitasi petahana dalam memenangkan kontestasi pilkada.

Meskipun pada konteks lainnya, petahana dapat dikalahkan oleh pasangan calon lain, yang disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti faktor internal dan eksternal, perilaku pemilih, pengelolaan media, dan pengawalan suara yang berlapis. Potensi kemenangan petahana dapat juga disebabkan oleh kemampuan petahana dalam memperoleh dukungan para elit lokal seperti pemuka agama, pemangku adat, ataupun dari *civil society* yang ada di daerah selain dari dukungan dan bekerjanya mesin partai politik pengusung.

Hal tersebut dimaknai sebagai kemampuan petahana dalam mengindoktrinasi ataupun mengkooptasi elit lokal berdasarkan bentuk-bentuk kekuasaan yang diimplementasikan. Seperti penelitian tentang elite lokal yang berbasis pesantren bersinergi dengan kekuatan politik, terutama dalam mendukung petahana yang bertarung mempertahankan kekuasaannya.

Beberapa artikel tentang kemenangan petahana dalam pilkada disebabkan faktor internal, yaitu penguatan tim pemenangan untuk memenangi pilkada. Sedangkan dalam perspektif *powercube* bahwa pada konteks politik lokal, *hidden power* sebagai modal kekuatan politik para elit. faktor internal dan adanya *hidden power* petahana agar bisa memenangkan pemilihan kepala daerah, maka artikel ini berargumen bahwa kemenangan petahana pada pilkada 2018 disebabkan adanya bentuk-bentuk kekuasaan lain seperti *visible power* (kekuasaan yang terlihat) dan *invisible power* (kekuasaan yang tidak terlihat).

Oleh sebab itu, artikel ini merupakan pemaknaan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan petahana pada kontestasi pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018. Sehingga sekaligus mengantarkan pada alasan mengapa seseorang bisa memenangkan pertarungan dalam politik. (Dikriansyah, 2018).

Dalam ruang media kontestasi politik, media massa merupakan saluran komunikasi yang menjangkau khalayak luas dan dapat memengaruhi wacana publik (*publik opinion*). Selain itu, media massa memiliki fungsi administratif dan menguatkan bentuk-bentuk sosial yang sudah ada. Lebih lengkapnya, fungsi media massa adalah untuk memberikan status pada isu publik, organisasi, dan pergerakan sosial dengan menyeleksi berbagai isu kemudian didistribusikan ke

berbagai lapisan publik.

Satu dari banyak isu dipilih untuk didiskusikan dan ditonjolkan, dan salah satu atau dua wakil dari berbagai kelompok *lobby* diseleksi dalam rangka partisipasi media. Dalam pandangan kritis, media mempunyai kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi dalam mengkonstruksikan realitas dan isu termasuk politik. Artinya ketika menjalankan fungsinya, media massa tidak bisa begitu saja memberikan realitas atau isu-isu, termasuk realitas dan isu politik. Pemberitaan media massa sarat dengan kepentingan politik.

Biasanya nuansa politis tersebut menampilkan dua kelompok tertentu yang dominan. Konflik ini akan tampil di media massa berdasarkan cara pandang mereka terhadap realitas, latar belakang, dan ideologi media yang bersangkutan, serta wartawan dalam meliput berita tersebut. Media bisa saja memiliki kecenderungan memihak salah satu dari kubu yang bertentangan tersebut atau bersikap netral. Namun, selalu ada kelompok-kelompok yang dominan dalam pemberitaan, baik dari segi wawancara, pendapat, kutipan, hingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mereka menyebarkan ideologi-ideologi tertentu melalui media dengan menggosok gagasan kelompok lain. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu bagian dari pesta demokrasi di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan pilkada ini memang merupakan sebuah pesta, karena selain melibatkan rakyat banyak juga menghabiskan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Maka dari itu, suatu kerugian besar jika pesta yang menghabiskan dana tidak sedikit itu tidak didukung

sepenuhnya oleh rakyat untuk memilih calon yang berkualitas.

Adapun bentuk dukungan yang harus masyarakat berikan adalah dengan mengawal secara langsung proses jalannya pilkada agar dapat jujur dan adil, memilih kandidat dengan bijak, serta tidak melakukan golput. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah syarat prosedural yang harus dipenuhi.

Pilkada menjadi sarana yang penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses pergantian pemimpin secara adil, dan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politiknya secara bebas. Pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap lebih baik. Partai politik dan para kandidat dapat memperebutkan jabatan politik secara adil dan terbuka. Semuanya dilakukan dalam batasan aturan yang jelas dan cara-cara yang sudah disepakati.

Tiap warga negara berhak untuk secara bebas memilih calon pilihannya sendiri, dan tiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang menyakinkan pemilih agar memilih dirinya di bilik suara. Terciptanya perputaran kekuasaan yang memadai dengan kesempatan yang terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan keahlian. Pilkada memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin politik baru yang diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik (Firdaus, 2018).

Sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan seperti pilkada, belum pernah ada seseorang perempuan yang berhasil memenangkan sebuah pilkada. Terlebih calon perempuan tersebut adalah seorang pendatang di Daerah pemilihan tersebut, sedangkan lawan politiknya dalam pilkada adalah seorang

petahana. Seorang petahana dianggap memiliki peluang yang lebih besar dari pada para kandidat lainnya, karena dianggap telah memiliki modal lebih besar seperti tingkat popularitas dan figuritas.

Perempuan dalam kontestasi politik tentu juga memiliki peluang yang sama dengan kandidat lainnya, meskipun partisipasi perempuan dalam sebuah kontestasi politik masih saja menjadi isu-isu yang menyudutkan kaum perempuan. Tetapi hal tersebut masih bisa diminimalisir tergantung bagaimana kekuatan modal yang dimiliki oleh kandidat.

Pilkada merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi yang melibatkan beberapa pasangan kandidat dan pemenangan dalam pilkada ditentukan dengan suara terbanyak oleh pemilih. Kompetisi yang terjadi boleh jadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing pasangan calon kandidat artinya meskipun aturan pencalonan minimal 15% kursi atau suara hasil legislatif. Ketentuan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat 2 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD”. Namun yang lebih dominan yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan (Firdaus, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan memfokuskan penelitian ini pada “Modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai fokus penelitian penulis yaitu, bagaimana modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu politik dan sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat bagi studi politik lokal.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan peneliti ini dalam tataran yang luas dapat menjadi masukan bagi para aktivitas politik dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa kemenangan yang diraih oleh kandidat dalam pilkada, tidak bisa diperoleh melalui “jalan pintas” tapi untuk mencapai kemenangan, modalitas yang dimiliki menepati posisi penting. Selain itu juga peneliti ini dapat memberikan sari bagi peneliti-peneliti tentang perkembangan politik khususnya mengenai modalitas petahana dalam proses politik Indonesia pasca reformasi 1998.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan terkait modalitas petahana dalam kontestasi politik (studi kasus keterpilihan indah putri indriani di pilkada luwu utara 2020), yaitu Ahmad Ardiansyah (2021), Riani Intan Kusuma, Yakub Andi, Ariana (2020), Fadli Andi Muh. Dzul (2018). Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

1. Ahmad Ardiansyah (2021), penelitian ini membahas tiga indikator dalam modalitas kemenangan Sutinah pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Mamuju yaitu, modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Sutinah Suhardi sebagai seorang perempuan dan juga pendatang baru dalam dunia politik mampu mengakumulasi modal yang dimilikinya, sehingga berhasil memenangkan pada pemilihan kepala daerah Mamuju tahun 2020.

Dari penelitian di atas, persamaan penelitian ini adalah titik faktor yang sama-sama membahas tentang modalitas dalam kontestasi politik. Tetapi yang membedakan penelitian ini, adalah jika beberapa penelitian terdahulu mengkaji modal sosial dengan mengkorelasikan aspek lainnya seperti budaya politik, kepercayaan politik dan tingkat partisipasi politik lain, lain halnya dengan penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada tiga modalitas sekaligus yaitu modal politik, modal

ekonomi, modal sosial, dimana penelitian ini ingin menjelaskan bahwa ketokohan dan popularitas tidak menjadi tolak ukur dalam mengarungi kontestasi politik, maka dari itu, penelitian tidak hanya ingin menjelaskan dari satu sisi saja terkait modalitas dalam kontestasi politik, tetapi penulis ingin mengkombinasikan tiga modal sekaligus untuk menjawab dinamika yang ada.

2. Riani Intan Kusuma (2020) Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kemenangan yang diperoleh kandidat Indah Putri Indriani sangat di pengaruhi oleh elit politik yang mendukungnya semasa kampanye berlangsung untuk menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi ketika menjabat sebagai bupati.

★ Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai peran dari elit lokal yang turut meramaikan pesta demokrasi di kabupaten Luwu Utara yang sangat memengaruhi dukungan masyarakat terhadap seorang kandidat dalam pencalonan di Luwu utara. Elit lokal yang turun mendukung calon kandidat terdiri dari elit formal dan non-formal. Kebaruan dari penelitian ini yaitu belum ada yang bahas mengenai peran elit lokal yakni Arifin Junaidi yang merupakan politisi senior Partai Golkar dan tokoh masyarakat adat Tomakaka kKombong Pitu Masapi yang sangat dihormati dan merupakan orang yang dituakan, dan memiliki gelar kepemimpinan yang bersifat non-formal serta predikat pemangku adat yang dituakan untuk menjadi tempat bertanya tentang tradisi budaya. Perbedaan, hanya membahas

demokrasi yang tidak sangat mempengaruhi dukungan masyarakat. Kedua elit lokal ini turut mendukung kemenangan Indah Putri Indriani selaku kandidat bupati dipemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

3. Andi Muh. Dzul Fadli Hasil kajian menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk kekuasaan sebagai faktor kemenangan petahana, yakni pertama, bentuk petahana, yakni pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible power*), kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*) ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*).

Persamaan ini melalui tiga dimensi bentuk, yaitu (*visible power*), kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*), dan kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*). Karena menggunakan teori *powercube* sebagai kerangka analisis dianggap relevan dalam memaknai kekuasaan dalam konteks politik lokal melalui proses demokrasi di daerah. Perbedaan, tidak dapat membantu untuk memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor didalamnya, persoalan dan situasi yang melatarbelakanginya, bahkan tidak kemungkinan untuk melakukan perubahan secara tepat dan evolusioner.

B. Kerangka Teori

1. Modalitas

Modalitas dalam Kontestasi Politik Pilkada merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Di dalam

demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya dan ikut kompetisi di dalam penetapan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pilkada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda (Azhar, 2014).

Menurut Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun simbolik, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki sebuah arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dicitrakan oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenal dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut. Modal juga dipandang sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran

pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus menerima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan “versi dunia sosial yang resmi (Wanta, 2018).

Pierre Bourdieu (1986), membedakan empat bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial, modal simbolik. Definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pilkada langsung, yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik, dan modal ekonomi. Pasangan calon bupati kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu (Purwaningsih, 2017).

a. Modal Sosial

Modal sosial merupakan modal yang dimiliki oleh kandidat itu sendiri, dapat dilihat pada latar belakang sosialnya seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya didalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain-lain) untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial dibagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial, kedua lebih menekankan pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Modal sosial memiliki arti yang sangat penting dan tidak kalah pentingnya dengan modal politik. Dengan adanya modal sosial, kandidat tidak hanya akan dikenal oleh para pemilih melainkan melalui pengenalan fisik dan sosial berjarak dekat para pemilih juga akan menilai apakah kandidat tersebut benar-benar layak untuk dipilih atau tidak jika seorang kandidat dikatakan memiliki modal sosial, berarti kandidat tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan (Pratiwi, 2021).

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah yang dapat dicermati sebagai berikut :

- 1) Robert Putnam : Modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya.
- 2) Pierre Bourdieu: Mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepala anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial).
- 3) James Coleman: Mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individual dalam struktur sosial tersebut.
- 4) North dan Olson: Menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.
- 5) Fukuyama: Menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat

kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi (Baharuddin, 2017).

b. Modal Budaya

Menurut E.B Taylor dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* menerangkan kebudayaan bahwa keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang di dapat manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut R Linton mengatakan bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentukannya di dukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu (Zamrodah, 2016).

Modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Maka, dapat dikatakan bahwa modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendidikan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik pendidikan formal maupun warisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara efektif (Purwaningsih, 2017).

Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- 1) Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya
- 2) Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi
- 3) Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas)
- 4) Kemampuan-kemampuan budayami dan pengetahuan praktis.
- 5) Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk.

Bagi kebudayaan Indonesia, pemikiran Bourdieu memberikan manfaat signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat, karena modal budaya dan habitus memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya. Hal ini relevan dengan masyarakat Indonesia yang mengenal yang namanya kelas sosial, dimana individu yang memiliki status sosial lebih tinggi dihormati dan dikenal daripada individu yang memiliki status sosial rendah (Pratiwi, 2021).

c. Modal Ekonomi

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang di pakai. Pada musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal modal ekonomi

dapat menjadi prasyarat utam ketika calon itu bukn berasal dari partai yang di calonkannya (Baharuddin, 2017).

Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang angat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demkrasi lokal, kaena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang beasar. Mahalnya ongkos pilkada dapat di sebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

- 1) Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di haruskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik.
- 2) Model kampanye politik yang di lakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya.
- 3) Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan prktek politik uang.

Kampanye bertujuan untuk mendapat dukungan dari masyarakat luas maka, aktivitas dalam menarik simpati asyarakat juga membutuhkan dana kampanye yang besar. Dana kampanye yang digunakan oleh kandidat atau partai politik dapat bersumber dari pasangan calon atau kandidat, partai politik atau gabungan partai poliyik serta sumbangan yang berasal dari individu, kelompok maupun badan hukum yang bersifat swasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye. Modal ekonomi adalah adanya dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana

pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk pemenangan pilkada (Irsat, 2018).

d. Modal simbolik

Modal simbolik adalah kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi. (Haryatmoko 2003).

Habitus

Habitus merupakan struktur kognitif yang memperantarai individu dengan realitas sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu yang lainnya dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial.⁴ Habitus bisa dikatakan merupakan produk sejarah, yang terbentuk setelah manusia itu lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan merupakan bentuk pengetahuan alamiah atau bawaan dari lahir. Dengan kata lain, habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, juga pendidikan masyarakat.

Dalam konsep pemikiran Bourdieu, habitus secara generatif merupakan “*a dialectic of internalization of externality and the externalization of internality*” atau habitus adalah hasil dari suatu

proses internalisasi yang meliputi struktur persepsi, modus apresiasi, dan sistem-sistem klasifikasi tindakan 4 Nanang Krisdianto. Op. Cit., 199 5 Loc. Cit., 199 kedalam diri seseorang, yang kemudian tereksternalisasi ulang dalam bentuk tindakan, yang pada gilirannya menjadi elemen pembentuk struktur sosial obyektif. Jadi habitus akan berbeda-beda, tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Habitus juga merupakan proses agensi tidak menerima mentahmentah struktur, agensi yang menginternalisasi struktur, tetap mempunyai ruang-ruang refleksi atas pilihan-pilihan rasionalnya sebagai saringan sebelum agensi mengiprovasinya.

Ranah

Ranah sendiri didefinisikan sebagai ruang kontestasi serta ruang di mana manuver dilancarkan dalam memperebutkan makna, sumber daya, pengakuan, keunggulan serta posisi-posisi yang menguntungkan. Ranah disebut juga sebagai sistem dari kedudukan sosial yang terstruktur secara internal dalam hubungan kekuasaan. Ranah mempunyai otonominya, dan semakin kompleks suatu masyarakat, maka semakin banyak pula ranah yang terdapat didalamnya.

Ranah-ranah didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur dengan kaidah-kaidah keberfungsianya sendiri, dengan relasi-relasi kekuasaannya sendiri, yang terlepas dari kaidah politik dan kaidah ekonomi, kecuali dalam kasus ranah ekonomi dan ranah

politik itu sendiri. Kendati tiap ranah relatif otonom, namun secara struktural mereka tetap homolog satu sama lain, Strukturnya, di momen apapun, ditentukan oleh relasi-relasi di antara posisi-posisi yang ditempati agen-agen di ranah tersebut. Ranah adalah konsep dinamis di mana perubahan posisi-posisi agen mau tak mau menyebabkan perubahan struktur ranah.

Secara khusus ranah dapat kita baca dalam pernyataan Bourdieu sebagai jaringan atau konfigurasi relasi objektif antara posisi yang secara objektif, didefinisikan dalam eksistensi mereka dan dalam determinasi yang mereka terapkan dengan posisi mereka dapat mempertahankan kekuasaan yang ada. Menurut Faisal, struktur ranahlah yang membimbing dan memberikan strategi bagi penghuni posisi, baik individu, maupun kelompok, untuk meingdungi posisi mereka dalam kaitannya dengan jenjang pencapaian sosial.⁷ Konsep ranah tidak bisa lepas dari ruang sosial yang mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial itu sendiri. Artinya, pemahaman ruang sosial yang mencangkup banyak ranah di dalamnya yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan terdapat titiktitik kontak yang saling berhubungan (Winoto 2017).

2. Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para

pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak (Mulyana, 2016).

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif) (Patel, 2019).

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan Presiden/eksekusi, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti Ketua Osis atau Ketua kelas, walaupun untuk ini kata “pemeilihan” Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum teknik agitasi dan teknik propoganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus (Azed, 1987).

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang

dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan (Anggara, 2019).

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan sebagai tujuan pemilu (Anggara, 2019). Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum yaitu, pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, yaitu seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasi tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, yaitu dalam menentukan pilihannya, pemilu dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, yaitu semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, yaitu dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada merupakan proses demokrasi secara *procedural dan substansial* dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan

oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pilkada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda (Purwaningsih, 2017).

Pilkada sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih trus dipertajam dan publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*socil capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal pilotik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara

pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu (Baharuddin, 2017).

Pemilihan umum Kepala daerah atau yang biasa disingkat dengan Pilkada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk Daerah setempat yang memenuhi syarat. Pilkada menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang “ pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah (Firdaus, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pilkada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Namun demikian, pengaturan pilkada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematis antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu secara materil, pemilu

memang tidak berbeda dengan pilkada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya (Firdaus, 2018).

Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen 2 (kedua), sedangkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen 3 (ketiga), maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22 E. logikanya hukumannya, karena kalau oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22 E, maka dapat dipastikan dalam amandemen 3 (ketiga) rumusan yang dapat pada Pasal 18 akan diubah dan diselesaikan dengan Pasal 22 E, namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amandemen. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di Daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara (Firdaus, 2018).

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena pemilihan kepala daerah menjadi salah satu pintu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil,

dan makmur sehingga masyarakat harus mampu memilih calon kepala daerah yang tidak semata-mata menawarkan janji kampanye melalui bahasa yang memikat akan tetapi mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Penggunaan bahasa pada slogan kampanye diusung sedemikian menarik oleh kandidat kepala daerah untuk mendapatkan simpati masyarakat. Melalui bahasa tersebut, aktor-aktor sosial menyampaikan ideologinya secara halus dengan menggunakan mekanisme kekerasan simbolik sebagai salah satu bentuk pertarungan simbolik.

Sulawesi selatan adalah salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pilkada tersebut diikuti 12 kabupaten/kota diantaranya: Kota Makassar (pilkada ulang tahun 2018), Pangkajene Kepulauan, Barru, Gowa, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Tana Toraja, Kepulauan Selayar, dan Toraja Utara. Kandidat yang mengikuti pemilihan kepala daerah tersebut berasal dari berbagai latar belakang dan profesi. Mulai dari pengusaha, tokoh masyarakat, dokter, polisi, okoh politik, dosen, dan pegawai negeri sipil.

Politikus sering menggunakan pilihan bahasa pada saat kampanye yang berisi ajakan maupun himbauan, misalnya stop korupsi, stop *money politic*, dan menjanjikan banyak perubahan mulai dari kesejahteraan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Namun pada kenyataannya, setelah mereka tidak sedikit dari janji yang mereka ucapkan hanya pemanis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masrakat tentang kompetensi latar belakang dari kandidat calon

kepala daerah membuat mereka menilai secara terbatas. Oleh karena itu, diharapkan melalui kajian ini ada kontruksi bahasa yang dapat dikembangkan dan ditemukan untuk menjadi model pendidikan karakter dalam pesta demokrasi melalui praktik bahasa.

Slogan kampanye yang diusung masing-masing kandidat merupakan pertarungan yang dilakukan secara tidak langsung. Pertarungan yang dimaksud adalah pertarungan simbolik. Mengkaji pertarungan simbolik dalam rana politik, khususnya pesta demokrasi 2020 tentu memerlukan analisis secara mendalam, termasuk mekanisme yang terdapat didalamnya. Pertarungan simbolik identik dengan kekerasan simbolik yang menggunakan elemen eufemisasi dan sensorisasi. Selain itu, faktor sosiokultural menjadi salah satu penentu bagi para kandidat dalam memperjuangkan ideologinya, hal tersebut dapat diamati melalui habitus, modal, dan arena. Teori analisis wacana kritis yang sesuai dengan uraian tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (Usman, 2021).

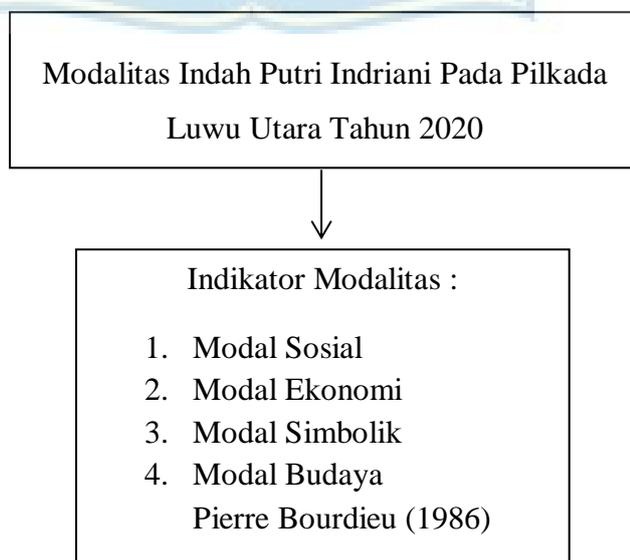
Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga Negara memilih/mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur mengubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga adalah bagian dari sebuah entitas yang sama (Rasyid, 2017).

C. Kerangka Pikir

Modalitas adalah pendekatan semiotika sosial ke pertanyaan tentang kebenaran. Hal ini terkait dengan isu representasi: fakta versus fiksi, realitas versus fantasi, nyata versus buatan, otentik versus palsu, dan pertanyaan dari interaksi sosial. Pertanyaan tentang kebenaran juga merupakan masalah sosial. Hal yang dianggap benar dalam satu konteks sosial tidak selalu dianggap benar pada konteks sosial lain dalam segala konsekuensinya (Darmawan, 2018).

Modalitas sosial politik merupakan sebuah kekuatan niscaya yang mesti dimiliki para kontestan ketika hendak berlaga dalam pesta demokrasi. Karena modalitas sosial politik berupa modal politik, modal ekonomi dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik. Melalui uraian di atas, maka peneliti menggambarkan alur berpikir penelitian ini yang menjadi acuan dalam menyusun penelitian ini.

Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:





Bagan 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun focus penelitian ini yaitu modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2020 berdasarkan indikator modalitas, yaitu: (1) Modal sosial, (2) Modal ekonomi, (3) Modal Simbolik, dan (4) Modal budaya.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan seperti interaksi sosial, adanya jaringan-jaringan yang mendukung (jaringan relasi), serta latar belakang pendidikan dan organisasi.
2. Modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi (harta kekayaan) Indah Putri Indriani dan dana kampanye untuk pemenangan pilkada.
3. Modal simbolik yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh Indah Putri Indriani melalui popularitas dan dukungan partai politik dan tokoh agama.

4. Modal budaya yaitu dukungan budaya berupa latar belakang pendidikan dan juga latar belakang keluarga, serta penghargaan yang diperoleh Indah Putri Indriani.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan 1 bulan yang berlokasi di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui modalitas Indah Putri Indriani dalam pilkada Luwu Utara tahun 2020.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yakni dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan. Tujuan digunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran modalitas Indah Putri Indriani dalam pilkada Luwu Utara tahun 2020.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan mengenai modalitas Indah Putri Indriani dalam pilkada Luwu Utara tahun 2020.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada implementor

dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana modalitas Indah Putri Indriani dalam pilkada Luwu Utara tahun 2020.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive Sampling*, merupakan teknik yang digunakan dalam memilih informan yang lebih mengetahui modalitas pada pemilihan bupati di Kabupaten Luwu Utara. Adapun informan penelitian digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP.,M.Si	Bupati Luwu Utara
2	Suaib Mansyur, S.T.,M.Si	Wakil Bupati Luwu Utara
3	Amrillah Todewi, SE	Sekretaris Jendral Fraksi Golkar Kab. Luwu Utara
4	Indra Wijaya Kusuma, A.Md.Par	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data mengenai peran modalitas politik di Luwu Utara.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu, pasangan Indah Putri Indriani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi khusus dari karangan penulis, buku, dan undang-undang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, di kerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil penelitian. Terdapat 3 (tiga) model pokok, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang di peroleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di datat secara rinci dan teliti. Seperti telah di kemukakan bahwa semakin lama peneliti di lapangan semakin banyak jumlah data, kompleks

dan rumit. Terlebih lagi perlu di lakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum/memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ke tiga analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiono, 2010).

Lebih lanjut membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Bab ini terangkum mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Luwu Utara. Gambaran umum ini meliputi letak geografis Kabupaten Luwu Utara, terkait juga tentang pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, dan jumlah penduduk serta dengan memberikan gambaran mengenai jumlah data pemilih tetap di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, penjelasan mengenai analisis hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian yaitu “Modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020”. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya.

1. Deskripsi Kabupaten Luwu Utara

a. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai dengan 121°43'11" Bujur Timur dibagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 7.502,58 km² atau sekitar 16,39 % dari wilayah provinsi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 15-70 mdpl dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl. Luwu Utara memiliki batas-batas dengan:

- 1) Utara : Sulawesi Tengah
- 2) Barat : Sulawesi Barat dan Tana Toraja
- 3) Selatan : Kabupaten Luwu dan Teluk Bone
- 4) Timur : Kabupaten Luwu Timur

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

KECAMATAN LUWU UTARA	LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN
Sabbang	525,08
Baebunta	295,25
Malangke	229,70
Masamba	1068,85
Malangke Barat	214,05
Sukamaju	255,48
Bone-Bone	127,92
Tana Lili	149,41
Mappedeceng	275,50
Rampi	1565,65
Limbong	686,50
Seko	2109,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2023.

b. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara

Data penduduk tahun 2020 yang disajikan pada bab ini adalah angka estimasi penduduk yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020 adalah 308.001 jiwa yang terdiri atas 154.594 laki-laki dan 153.407 perempuan. Pada periode yang

sama, diperkirakan terdapat sekitar 75.480 rumah tangga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sekitar 4 orang. Pada 2020, kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Utara mencapai 40 jiwa/km².

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Malangke Barat dengan kepadatan penduduk 283 jiwa/km². Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Luwu Utara di atas 100. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Luwu Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)
1	Sabbang	38.319
2	Baebunta	45.849
3	Malangke	27.663
4	Malangke Barat	24.303
5	Sukamaju	41.815
6	Bone-bone	26.922
7	Tana Lili	22.497
8	Masamba	36.862
9	Mappedeceng	23.489
10	Rampi	3.239
11	Limbong	3.915
12	Seko	13.138

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

c. Pemerintahan

Kabupaten Luwu Utara Secara administratif terbagi menjadi 12 Kecamatan dan dibagi lagi menjadi sebanyak 171 Desa dan 7 Kelurahan.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 35 orang, dengan 33 orang laki-laki dan 2 perempuan.

Tabel 4.3 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik

Partai Politik	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
GOLKAR	8	0	8
NASDEM	4	0	4
HANURA	4	0	4
PAN	4	0	4
DEMOKRAT	3	0	3
GERINDRA	3	0	3
PKB	2	0	2
PKS	2	0	2
PERINDO	2	0	2
PDI-P	2	0	2
PPP	1	0	1

d. Jumlah Data Pemilih Tetap

Penopang keberhasilan dalam berdemokrasi adalah dengan melihat partisipasi pemilih pada setiap pemilihan umum yang dilakukan, partisipasi pemilih dapat dilihat melalui hasil perhitungan data pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan jumlah data pemilihan tetap di Luwu Utara dapat diklasifikasikan pemilih laki-laki sebanyak 109.254 dan pemilih perempuan sebanyak 109.734 jumlah keseluruhan adalah sebanyak 218.988. Berdasarkan jumlah data pemilih tetap, dapat disimpulkan bahwa pemilih perempuan lebih besar dibanding pemilih laki-laki.

Tabel 4.4 Jumlah Pemilih

JUMLAH DATA PEMILIH TETAP		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah
111.073	111.414	222.487

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data KPUD Luwu Utara Tahun 2020

2. Biografi Indah Putri Indriani

Indah Putri Indriani merupakan perempuan pertama yang menjadi Bupati di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Latar belakang Indah Putri Indriani di kenal sebagai seorang akademisi kelahiran Jayapura pada 7 Februari 1977. Ia anak bungsu dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan H. Musallang Sumase dan Hj. Nurhayati Tahir. Memulai pendidikannya di sekolah dasar 178 Kecamatan Bone-Bone dan menghabiskan masa kecilnya di kota kecil Kanjiro, Desa Muktisari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Suami Indah Putri Indriani bernama Muhammad Fausi merupakan seorang anggota DPR RI 2014 dan juga merupakan seorang pengusaha.

Indah Putri Indriani adalah kombinasi asuhan pendidik dan ulama. Ia merupakan anak dari seorang guru sekolah dasar. Dibesarkan dengan pondasi pendidikan yang kuat, terdidik dalam lingkungan Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo, selama enam tahun, tiga tahun setingkat SMP dan tiga tahun setingkat SMA. Masa-masa sekolah yang panjang Ia habiskan untuk belajar organisasi. Jiwa kepemimpinan Indah mulai terlihat saat duduk di bangku sekolah.

Indah Putri Indriani pernah menyanggah gelar ketua OSIS terbaik tingkat nasional. Sebelum ikut serta dalam dunia politik, Indah Putri Indriani dikenal di kalangan akademis sebagai salah satu staf pengajar program Sarjana (S1), program ekstensi dan program pasca-sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Di samping itu, Indah juga tercatat sebagai staf pengajar Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial pada dua universitas lain di Jakarta, yaitu Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Indah Putri Indriani juga pernah menjadi salah seorang tenaga ahli untuk komisi II DPR RI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah. Selain itu, Ia juga pernah maju dalam pemilihan umum sebagai calon anggota legislatif di dapil Papua, dan dapil 3 Sulawesi Selatan.

Pengetahuan dan pengalaman Indah Putri Indriani di bidang politik tentu menjadi salah satu pendongkrak popularitas namanya di kancah perpolitikan. Hingga di tahun 2010, Ia memutuskan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara. Dan melanjutkan perpolitikan mejadi calon Bupati tahun 2015, hingga ia terpilih dan sampai menjadi seorang petahana pada tahu 2020.

B. Modalitas Indah Putri Indriani Dalam Pilkada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Modalitas dalam kontestasi politik pilkada merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Di dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan

sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi di dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi didalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pilkada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda. Untuk meninjau dan mengetahui lebih jauh tentang modalitas kemenangan Indah Putri Indriani pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu Utara menggunakan indikator-indikator yang meliputi (1) Modal Sosial, (2) Modal Ekonomi, (3) Modal Simbolik, dan (4) Modal Budaya.

1. Modal Sosial

Modal sosial merupakan salah satu modalitas yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan hubungan yang harmonis serta kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu penulis menganggap modal sosial sebagai salah satu komponen utama guna menggerakkan mobilitas massa, sehingga saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial meliputi:

a. Interaksi sosial

Interaksi sosial Indah Putri Indriani adalah dengan membangun hubungan timbal balik antara dirinya dengan individu atau masyarakat lainnya. Interaksi sosial ini memungkinkan masyarakat mengenali Indah Putri Indriani sehingga dapat membangun suatu pola hubungan interaksi. Indah Putri Indriani mampu membangun dan menjaga interaksinya

dengan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari aktivitasnya sebagai wakil bupati periode sebelumnya, yang tidak sungkan-sungkan mendatangi setiap acara yang digelar masyarakat, seperti pestapesta, kegiatan sosial ataupun mengunjungi masyarakat yang tertimpa musibah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Bupati terpilih Luwu Utara.

“Ibu Indah memiliki hubungan yang baik dengan semua kalangan masyarakat, beliau selalu hadir pada setiap kesempatan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti, pernikahan, acara duka dan kegiatan sosial lainnya, Ibu Indah mampu membangun interaksi yang sangat kuat dengan masyarakat” (wawancara dengan SM, 3 Juni 2023).

Jika mencoba membandingkan dengan calon bupati lainnya terkait interaksi sosial yang dimilikinya, Indah Putri Indriani lebih unggul dari pada calon lainnya, dimana Indah Putri Indriani dikenal memiliki kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat, mampu menjaga komunikasi dengan masyarakatnya, turut serta pada kegiatan-kegiatan masyarakat, hal demikian dilakukannya kepada semua kalangan masyarakat tanpa memandang derajat dan lain-lain.

Indah Putri Indriani menghadiri acara masyarakat dari kalangan umat Hindu yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Meskipun Indah Putri Indriani adalah seorang muslim, Indah Putri Indriani bersedia menghadiri kegiatan masyarakat tersebut. Hal ini merupakan gambaran bagaimana kualitas hubungan yang terbangun antara Indah Putri Indriani dengan masyarakat, tanpa memandang agama, suku, dan derajat sosial seseorang.

Interaksi sosial antara calon bupati dan masyarakat, semestinya sudah terbangun sejak lama, tidak hanya pada saat menjelang pilkada saja. Tetapi masih banyak juga para calon kepala daerah yang membangun komunikasi atau interaksinya itu pada saat menjelang pilkada. Berbeda dengan Indah Putri Indriani yang sejak lama membangun interaksi dengan masyarakat, bahkan Interaksi itu sudah lama terbangun sebelum Indah Putri Indriani mendeklarasikan dirinya maju dalam Pilkada Luwu Utara 2020.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Praksi Golkar Kab. Luwu Utara.

“Modal sosialnya sangat kuat, beliau sangat dekat dengan masyarakat, kemampuan interaksinya sangat menonjol dan tidak diragukan lagi kepada masyarakat. beliau sangat aktif menghadiri sejumlah kegiatan di lingkungan masyarakat” (wawancara dengan AT, 3 Juni 2023).

Indah Putri Indriani adalah sosok perempuan yang sangat sederhana dalam kehidupannya dan juga tergolong orang yang tingkat sosialisasinya cukup dekat dengan masyarakat, apalagi terhadap masyarakat menengah kebawah, walaupun dalam kelas sosial masyarakat, Indah Putri Indriani menduduki kelas menengah keatas.

b. Latar belakang pendidikan dan organisasi

Latar belakang sosial yang dimiliki Indah Putri Indriani bisa dicermati seperti, kualifikasi pendidikan, pengalaman pekerjaan atau pengalaman organisasi. Hal ini merupakan contoh-contoh yang harus dimanfaatkan Indah Putri Indriani untuk membangun suatu relasi dan juga kepercayaan

dari masyarakat, hal ini menandakan bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan dari masyarakat.

Indah Putri Indriani mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat karena masyarakat telah mengenal dengan baik nama dan wajah Indah Putri Indriani sebagai wakil bupati periode sebelumnya. Selain itu, masyarakat Luwu Utara telah mengetahui profesi dan kompetensi Indah Putri Indriani sebelum menjabat sebagai wakil bupati, Indah Putri Indriani juga dikenal sebagai seorang akademisi yang pernah menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia.

Modal partai saja tidak cukup untuk meraih kekuasaan karena sebagian besar partai tidak memiliki kepercayaan publik. Atas dasar tersebut Indah Putri Indriani sebagai kandidat calon melakukan edukasi dan mencoba menarik kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Memberikan edukasi terhadap masyarakat merupakan tugas KPU namun secara jaringan pengaman nasional ada namun belum optimal pada sisi prakteknya.

Dengan latar belakang pekerjaan yang digeluti sebelumnya, yaitu sebagai akademisi dan juga sebagai seorang wakil bupati periode sebelumnya, Indah Putri Indriani mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat (*trust*) yang kemudian dianggap memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk memimpin Kabupaten Luwu Utara melalui pemilihan umum kepala daerah tahun 2020.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

“Indah Putri Indriani sebagai seorang akademisi dan juga sebagai wakil bupati pada periode sebelumnya, dianggap cerdas dan mampu membangun komunikasi yang harmonis, sehingga mendapatkan kepercayaan langsung dari masyarakat Luwu Utara” (wawancara dengan AWK, 3 Juni 2020).

Kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, membuat Indah Putri Indriani mempunyai citra yang baik dalam masyarakat, karena mampu membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Hal itu tidak hanya terjadi saat beliau menjabat sebagai calon bupati tahun 2020, tetapi komunikasi itu sudah terbangun sejak lama, sehingga Indah Putri Indriani mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakatnya.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wadah untuk upaya mengintegrasikan kebutuhan kaum perempuan melalui materi-materi kampanye kandidat. Indah Putri Indriani menggunakan isu dan permasalahan lokal yang dihadapi perempuan untuk menarik perolehan suara pemilih. Di sisi lain, kelompok-kelompok perempuan juga memperoleh ruang dan waktu untuk mengkampanyekan isu-isu kebutuhan kaum perempuan itu sendiri agar nantinya dapat diperjuangkan dalam kebijakan jika kandidat terpilih dalam hal ini adalah Indah Putri Indriani.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Praksi Golkar Kab. Luwu Utara:

“Pada pilkada 2020 pendukung Indah Putri Indriani mayoritas perempuan, para perempuan menggunakan hak pilihnya untuk mendukung Indah Putri” (wawancara dengan AT, 3 Juni 2023).

Indah Putri Indriani yang sudah dikenal lama oleh masyarakat ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Luwu Utara pada periode 2010-2015 dan 2015-2020, dikenal sangat dekat dengan masyarakat, serta selalu hadir dalam acara-acara seperti pesta pernikahan, pengajian, syukuran ataupun acara duka, hal inilah yang membuat Indah Putri Indriani mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat sehingga isu-isu gender tersebut tidak banyak berpengaruh.

Indah Putri Indriani mampu mengantisipasi isu-isu tersebut dengan melakukan pemetaan suara (mapping), sosialisasi dan konsolidasi secara intensif disemua kalangan termasuk kaum perempuan di beberapa daerah-daerah yang ada di kabupaten Luwu Utara. Pada Pemilu 2020, jumlah data pemilih laki-laki sebesar 111.073 orang sedangkan untuk perempuan sebesar 111.414 orang. Adapun jumlah data pemilih tetap pada pemilu 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data Pemilih Tetap Pada Pemilu 2020 Luwu Utara Tahun 2020

JUMLAH PEMILIH	
Laki-laki	Perempuan
111.073	111.414

Sumber: KPUD Kabupaten Luwu Utara, 2020

Dari Jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilu 2020 Luwu Utara tahun 2020 sebagaimana tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah DPT

perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Serta dalam hal penggunaan hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), perempuan menggunakan hak pilihnya lebih banyak dari pada pemilih laki-laki. Adapun jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilukada Luwu Utara tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Kab. Luwu Utara Tahun 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Malangke	7.349	7.707	15.056
Bone Bone	7.298	7.814	15.112
Masamba	9.641	10.970	20.611
Sabbang	5.007	5.271	10.278
Rongkong	1.250	1.135	2.385
Sukamaju	7.768	8.214	15.982
Seko	4.202	3.813	8.015
Malangke Barat	6.705	7.023	13.728
Rampi	1.018	815	1.833
Mappedeceng	6.971	7.358	14.329
Baebunta	8.536	9.093	17.629
Tana Lili	6.514	7.061	13.575
Sukamaju Selatan	4.795	5.100	9.895
Baebunta Selatan	4.169	4.408	8.577
Sabbang Selatan	5.603	6.202	11.805
Total	86.826	91.984	178.810

Sumber: Data KPUD Kab. Luwu Utara

Pada pilkada Tahun 2020, pemilih perempuan di Luwu Utara turut berpartisipasi langsung untuk mendukung Indah Putri Indriani. Meskipun banyaknya isu-isu gender tentang minimnya kapasitas perempuan untuk memimpin Kabupaten Luwu Utara. Tetapi kenyataannya, Indah Putri Indriani mampu dan berhasil mendapatkan kepercayaan semua kalangan termasuk kaum perempuan itu sendiri, sehingga isu-isu gender tersebut dapat diminimalisir.

Pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani memiliki pengaruh yang bersifat subyektif yang dapat memengaruhi para calon pemilih lainnya dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara 2020, karena masyarakat sendiri sebelum menentukan pilihannya, tentu akan melihat jejak rekam baik itu dari latar belakang pendidikan, pekerjaan ataupun keterlibatannya dalam kegiatan organisasi lainnya.

Kemenangan Indah Putri Indriani dalam pilkada Luwu Utara tahun 2020, tidak hanya diperoleh melalui jalan pintas, tetapi untuk mencapai kemenangan ini, Indah Putri Indriani memerlukan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat yang memilih. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan/popularitas seorang figur kandidat sangat memengaruhi tingkat dukungan masyarakat, apalagi jika figur kandidat tersebut merupakan orang yang terpendang dan bersahaja serta telah memiliki kepercayaan oleh masyarakat.

c. Jaringan relasi

Modal sosial berupa jaringan relasi komunitas. Modal sosial yaitu suatu jaringan hubungan sebagai sumber untuk menentukan status sosial. Modal sosial tercermin dari banyaknya jumlah aktivis, pekerja NGO, pekerja organisasi sosial, dan sebagainya. Modal sosial juga mempunyai jaraingan dengan kutub-kutub kekuasaan baik di level nasional maupun level global (Halim, 2014).

Jaringan relasi dari Indah Putri Indriani sangat dibutuhkan juga sebagai suatu gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas

dukungan dalam pemenangan pilkada di Kabupaten Luwu Utara. Melibatkan seluruh kelompok masyarakat sebagai pelopor. Masyarakat Luwu Utara dijadikan mitra oleh Indah Putri Indriani dalam menjalankan agenda sosialisasi dan konsolidasi. Bentuk peran serta masyarakat ini mampu mendorong tumbuhnya kepercayaan serta dukungan masyarakat lainnya untuk memenangkan calon kepala daerah pada pilkada Luwu Utara Tahun 2020. Jaringan relasi lainnya seperti alumni pesantren PMDS (Adidas Family) yang aktif memberikan dukungan kepada Indah Putri Indriani, dimana Adidas Family terdiri dari berbagai golongan masyarakat yang tersebar disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Praksi Golkar Kab. Luwu Utara:

“Pada pilkada 2020 Bu Putri bukan mencalonkan pertama melainkan yang kedua, merupakan petahan saat itu. Jadi beliau selama masa jabatannya pada periode 2010-2015 tentu memiliki banyak relasi. Diluar daripada itu latar belakang organisasi beliau sangat menonjol ” (wawancara dengan AT, 3 Juni 2023).

Indah Putri Indriani yang sudah dikenal lama oleh masyarakat ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Luwu Utara pada periode 2010-2015 dan 2015-2020, dikenal sangat dekat dengan masyarakat, sehingga tidak heran jika Indah Indah Putri Indriani memiliki relasi yang cukup baik sebagai modal pada pilkada 2020 di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan wawancara peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki Indah Putri Indriani pada Pilkada 2020 adalah, pertama interaksi sosial dengan masyarakat, Indah Indah Putri

Indriani aktif dalam kegiatan dengan masyarakat. Kedua latar belakang pendidikan dan organisasi. Ketiga jaringan sosial atau relasi yang dimiliki sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas dukungan dalam pemenangan pilkada di Kabupaten Luwu Utara.

2. Modal Ekonomi

Modal ekonomi memang sangatlah urgen untuk menstimulasi berjalannya aktivitas atau sebuah program yang sudah direncanakan. Apalagi, kaitannya dengan kerja-kerja kampanye politik dalam momentum pemilu. Dalam konteks ini, seorang kandidat mesti terlebih dahulu mempersiapkan modal (anggaran) untuk bisa dipakai dalam mengeksekusi program kampanye strategis maupun taktis yang mendesak untuk segera dilakukan.

Sistem pilkada yang menggunakan sistem suara terbanyak yaitu dengan memilih pasangan calon secara langsung, mengharuskan setiap pasangan calon harus mempunyai dukungan *financial* (keuangan) sebagai *political fee* (ongkos politik). Hampir dukungan *financial* ini tidak bisa dihindarkan lagi bagi setiap kandidat. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak memiliki dukungan *financial*, maka kemungkinan besar tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang dalam kontestasi politik seperti pilkada.

Modal ekonomi meliputi:

a. Harta kekayaan

Sebagai pejabat publik, calon kepala daerah atau kepala daerah mempunyai kewajiban menjelaskan berapa jumlah dan dari mana

kekayaannya. Sesungguhnya informasi ini sangat dibutuhkan publik sebagai bagian pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih calon tersebut. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ini juga bisa menjadi indikator apakah seseorang mempunyai kepatuhan terhadap peraturan hukum atau tidak. Laporan ini kemudian juga bisa ditelusuri oleh lembaga-lembaga tertentu dan kelompok masyarakat yang ingin tahu lebih detail.

Tabel 4.7 Laporan Harta Kekayaan Indah Putri Indriani

Tahun	Harta Kekayaan
2015	Rp 10.573.933.73
2020	Rp 7.533.150.422

Sumber: TribunLutra.com

Tabel di atas menunjukkan bahwa harta kekayaan Indah Putri Indriani pada tahun 2020 yaitu Rp. 7.533.150.422, pada Pilkada periode sebelumnya yakni pilkada tahun 2015 harta kekayaan Indah Putri Indriani sebesar Rp. 10.573.933.73. Diketahui bahwa harta kekayaan calon kepala daerah pada pilkada Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 yang paling besar yaitu Indah Putri Indriani.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Bupati terpilih Luwu Utara.

“Waktu itu pada pilkada 2020, harta kekayaan calon kepala daerah yang paling besar yaitu Indah Putri Indriani.” (wawancara dengan SM, 3 Juni 2023).

Senada dengan hal tersebut, Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara 2020 juga menyatakan bahwa:

“Laporan harta kekayaan itu memang benar atas nama saya, jadi semua memang harus dilaporkan sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam pilkada 2020. Semua daftar harta kekayaan saya itu dimulai saat saya menjadi dosen dan ada juga merupakan pemberian dari orang tua saya , saya tidak menjadikan itu sebagai satu-satunya modal yang saya punya” (wawancara dengan IPI, 3 Juni 2023).

Kekayaan Indah Putri Indriani ini juga menjadi salah satu modal dalam kontestasi politik, guna memenangkan pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020. Selain itu, pelaporan harta kekayaan ini juga dianggap sebagai kepatuhan dari seorang Indah Putri Indriani terhadap aturan-aturan yang ada.

b. Dana kampanye

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan.

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada saat pilkada. Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang cukup besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain. Oleh karena itu, dana kampanye juga bisa berasal dari donasi/sumbangan pribadi dan kelompok/perseorangan untuk membantu para kandidat dalam menguatkan modal ekonominya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Praksi Golkar

Kab. Luwu Utara:

“Dana kampanye Indah Putri Indriani bersumber dari dana sumbangan pribadi, sebagian dari jumlah ini didapatkan melalui orang tua dan juga suami. Ada juga penyumbang dari pihak lain perseorangan” (wawancara dengan AT, 3 Juni 2023).

Dana kampanye yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani dalam pilkada 2020 yang lalu, berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk operasional tim, konsumsi, transportasi, sosialisasi, pembuatan posko, sewa/rental dan dana operasional saat kampanye.

Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih atau tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat.

Jika melihat aktivitas pengeluaran dana kampanye Indah Putri Indriani dari segi bentuk aktivitas seperti pembentukan tim, biaya operasional tim, sewa/rental ataupun biaya akomodasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan Indah putri Indriani menjadi Bupati terpilih tahun 2020 juga membutuhkan dana politik yang cukup besar.

Berdasarkan wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa modal ekonomi yang dimiliki Indah Putri Indriani adalah harta kekayaan dan dana kampanye. Modal ekonomi yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam

melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencalonannya dalam pilkada di kabupaten Luwu Utara. Modal ekonomi Indah Putri Indriani yang begitu besar mampu memengaruhi kerja-kerja para relawan dan tim pemenangan lebih produktif dalam melakukan sosialisasi dan konsolidasi dukungan terhadap Indah Putri Indriani.

3. Modal Simbolik

Modal simbolik yaitu berupa popularitas, popularitas yang dimiliki Indah Putri Indriani merupakan gerbang pembuka untuk memikat calon pemilih dalam pilkada. Di setiap lapisan masyarakat pasti ada orang yang memiliki daya tarik atau perhatian khusus.

Salah satunya adalah orang dengan kepribadian dan gaya hidup yang cukup jelas untuk menarik perhatian orang dan memaksa mereka untuk mengikuti.

Dengan adanya media yang mudah diakses oleh semua orang maka mengakumulasi modal simbolik dalam bentuk popularitas. Semakin banyak disorot, artis akan semakin bersinar dan dikenal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara 2020.

“Popularitas itu sangat membantu sekali dan menjadi indikator pertama sebelum seseorang masuk ke ranah pemilu. Bagaimana kita menjabat kalau tidak dipilih? dan bagaimana kita dipilih kalau kita bahkan tidak dikenal? Jadi popularitas itu adalah orang mengetahui siapa saya, siapa nama saya dan dihitung dalam jumlah tertentu dan itu populer semakin banyak orang berarti semakin populer. Kontestasi pilkada itu regional tetapi populeritas saya sebagai yang sebelumnya dosen, aktif diberbagaiorganisasi, disitu mungkin banyak yang mengenal saya” (wawancara dengan IPI, 3 Juni 2023).

Popularitas dan elektabilitas Inda Putri Indriani bukan hasil dari spontanitas selama satu atau dua bulan di Kabupaten Luwu Utara melainkan juga dari hasil dari jerih payah yang dilakukan. Terbukti bahwa modal popularitas membawa selangkah lebih maju dibandingkan calon-calon lainnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara 2020.

“Popularitas bu Indah di Kabupaten Luwu Utara tidak perlu diragukan, sepak terjang beliau. Mulai dari latar belakang pendidikan, organisasi. Sebelum jadi bupati pada tahun 2010 beliau memang sangat aktif organisasi. Dan saya sangat beruntung dipilih untuk menjadi wakil beliau pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur” (wawancara dengan SM, 3 Juni 2023).

Modal simbolik yang terakumulasi dalam popularitas memang terlihat jelas disini. Popularitas pribadi Indah Putri Indriani memang menjadi indikator utama tetapi juga yang ikut andil dalam kemenangan tersebut mulai dari pasangan calon, partai politik dan ketokohan orang-orang yang telah mendampingi Indah Putri Indriani dalam masa kampanye.

Modal simbolik berupa tokoh-tokoh partai dan agama yang turut membantu karena mereka memiliki pengetahuan agama serta memiliki kharisma sehingga berpeluang sangat besar untuk merebut kekuasaan. Partai Golkar, PAN, Demokrat, PDI-P dan PPP sebagai partai yang mengusung dan membantu dalam mendampingi Indah Putri Indriani berkampanye.

Tabel 4.8 Dukungan Partai Politik Indah Putri Indriani Pada Pemilu Kada Luwu Utara Tahun 2020

No	Partai	Jumlah Kursi di DPRD
1	Golkar	4 Kursi
2	PAN	3 Kursi
3	Demokrat	2 Kursi
4	PDI-P	3 Kursi
5	PPP	2 Kursi
Total		14 Kursi

Sumber: Data KPUD Kab. Luwu Utara

Indah Putri Indriani memperoleh dukungan 5 partai politik dengan jumlah kursi 14. Dengan jumlah kursi yang diperoleh oleh keempat partai pengusung tersebut maka Indah Putri Indriani memenuhi syarat pencalonan, yaitu 40% dari syarat minimal yang ditetapkan yaitu 20% atau 25% suara sah bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD.

Selain karena dukungan partai politik, Indah Putri Indriani memang sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat karena pemilu Kada ini bukan merupakan pertama kali baginya. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

“Saya selaku masyarakat sudah mengenal sosok Indah Putri Indriani karena sebelumnya beliau sudah menjabat sebagai Bupati Luwu Utara, dan pilkada 2020 ada masa periode kedua beliau menjabat. Selain karena sudah mengenal tata pemerintahan beliau, juga didukung oleh partai besar serta didukung oleh tokoh terkemuka atau tokoh agama misalnya di Kabupaten Luwu Timur” (wawancara dengan AWK, 3 Juni 2020).

Dukungan partai dan tokoh agama kepada Indah Putri Indriani menjadikannya unggul dalam segi simbolik pada pilkada 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Banyaknya dukungan yang diterima dari segala aspek

menjadikan Indah Putri Indriani semakin kuat dan mampu terpilih sebagai Bupati Luwu Utara tahun 2020-2025.

Berdasarkan wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa modal simbolik yang dimiliki Indah Putri Indriani pada pilkada 2020 adalah popularitas dan dukungan partai dan tokoh agama. Popularitas dan elektabilitas Indah Putri Indriani bukan hasil dari spontanitas selama satu atau dua bulan di Kabupaten Luwu Utara melainkan juga dari hasil dari jerih payah yang dilakukan. Dukungan partai dan tokoh agama kepada Indah Putri Indriani menjadikannya unggul. Terbukti bahwa modal popularitas membawa selangkah lebih maju dibandingkan calon lainnya.

4. Modal Budaya

Modal kultural budaya kualifikasi intelektual yang komprehensif yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau warisan keluarga, seperti kemampuan yang terlihat di depan umum, kepemilikan kekayaan budaya yang berkualitas, serta pengetahuan dan keterampilan khusus, pendidikan formal yang dihasilkan, sertifikat (gelar sarjana), dan lain-lain.

Modal budaya diperoleh Indah Putri Indriani dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Maka dapat dikatakan bahwa modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendidikan yang diperoleh oleh Indah Putri Indriani tersebut, baik pendidikan maupun latar belakang keluarga. Adapun modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri, antara lain:

a. Latar belakang keluarga

Latar belakang keluarga Indah Putri Indriani adalah merupakan seorang pendatang yang kemudian berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, Ayah Indah Putri Indriani bernama Musallang Sumasse, beliau adalah seorang yang latar belakang keluarganya berasal dari daerah bugis yaitu Kabupaten Sidrap, memiliki pekerjaan sebagai seorang wiraswasta dan bertani. Sedangkan Ibu dari Indah Putri Indriani bernama A. Nurhayati Tahir, seorang yang latar belakang keluarganya berasal dari daerah bugis yaitu Kabupaten Bone dan Sengkang, Ibu dari Indah Putri Indriani ini adalah seorang pensiunan guru.

Suami Indah Putri Indriani bernama Muhammad Fausi, beliau juga adalah seorang pendatang yang berasal dari Aceh yang kemudian memilih berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, beliau adalah mantan anggota DPR RI dan juga sebagai seorang wiraswasta. Banyaknya dukungan dari keluarga membuat Indah Putri Indriani akhirnya kembali berkompetisi pada pilkada 2020 di Kabupaten Luwu Timur. Adapun latar belakang keluarga dari Indah Putri Indriani adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Latar Belakang Keluarga Indah Putri Indriani

Nama / Keluarga	Pekerjaan	Asal
Musallang Sumasse / Bapak	Wiraswasta/Petani	Kabupaten Sidrap
A. Nurhayati Tahir / Ibu	Guru	Kabupaten Bone
Muhammad Fausi / Suami	Wiraswasta & Eks. Anggota DPR-RI	Aceh

Sumber: Wawancara dengan Indah Putri Indriani

Kedua Orang tua dan suami Indah Putri Indriani juga memiliki andil yang besar dalam kemenangan Indah Putri Indriani dalam pilkada 2020 yang lalu, dimana dukungan ekonomi ataupun dana kampanye yang terdata di KPUD Kabupaten Luwu Utara atas nama Indah Putri Indriani, sebagian berasal dari dukungan dari kedua orang tua dan juga Suami Indah Putri Indriani secara langsung. Selain itu latar belakang keluarga Indah Putri Indriani yang merupakan pendatang akhirnya juga mampu memobilisasi massa pemilih dari kalangan pendatang untuk mendukung Indah Putri Indriani pada Pilkada Luwu Utara 2020.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara 2020.

“Saya menimbang bahwa ada potensi dalam pertarungan pilkada 2020 dapat saya menangkan dengan modalitas yang cukup, setelah saya menghubungi bapak Suaib Mansyur untuk menjadi calon wakil bupati Luwu Utara 2020, dengan penuh pertimbangan mulai dari praksi pendukung yang meyakini saya dalam memutuskan beliau memiliki potensi besar untuk membantu saya memenangkan pilkada luwu utara 2020” (wawancara dengan IPI, 3 Juni 2023).

Meskipun memiliki latar belakang keluarga sebagai seorang politisi, namun mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan mampu mengalahkan lawan politiknya pada pilkada 2020 di Kabupaten Luwu Utara.

b. Penghargaan yang diperoleh

Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh perorangan ataupun suatu lembaga.

Suatu penghargaan bisa saja disertai dengan pemberian hadiah berupa uang atau piagam atas kontribusi kinerja terhadap masyarakat luas.

Pada periode 2010-2015, Indah Putri Indriani berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan, penghargaan tersebut diperoleh atas kontribusinya selama menjabat sebagai wakil bupati Luwu Utara, penghargaan tersebut diberikan Presiden RI. Adapun penghargaan-penghargaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Penghargaan Indah Putri Indriani

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun
Satya Lencana Panca Warsa III	Presiden RI	2010
Satya Lencana Panca Warsa IV	Presiden RI	2013
Satya Lencana Darma Bakti	Presiden RI	2014

Sumber: KPUD Kabupaten Luwu Utara

Penghargaan-penghargaan yang diperoleh Indah Putri Indriani adalah merupakan sebuah prestasi yang didapatkan selama masih menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara periode 2010 – 2015 dan 2015-2020.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Praksi Golkar Kabupaten Luwu Utara:

“Indah Putri Indriani ini kan bupati pada periode sebelumnya kemudian kembali mencalonkan lagi. Pada periode sebelumnya beliau banyak mendapatkan penghargaan dalam menjabat sebagai Bupati Luwu Utara. Tentu ini menjadi penilai bagi semua pihak untuk mendukung bu Indah” (wawancara dengan AT, 3 Juni 2023).

Seperti diungkapkan pula oleh Wakil Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara 2020:

“Prestasi bu Indah selama menjabat 2 periode sangat patut diberi apresiasi. Tak dipungkiri prestasi yang berperan pada terpilihnya kembali kami pada pilkada 2020” (wawancara dengan SM, 3 Juni 2023).

Penghargaan ini tentunya memiliki pengaruh pada saat pilkada 2020 yang lalu. Penghargaan ini juga bisa menjadi ukuran apakah seorang calon kepala daerah tersebut memiliki kemampuan yang telah diakui selama masih menjabat bupati.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa modal budaya yang dimiliki Indah Putri Indriani adalah latar belakang keluarga dan penghargaan yang diterima. Modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani seperti latar belakang keluarga ataupun penghargaan-penghargaan atas prestasinya itu kemudian mampu dijadikan sebagai *brand marketing* pada saat sosialisasi dan saat kampanye, sehingga modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani dianggap mampu mempengaruhi calon pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan maka peneliti akan menguraikan analisa sesuai rencana penelitian mengenai Modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020. menggunakan 4 modalitas yaitu, modal sosial, modal ekonomi, modal simbolik, dan modal budaya.

Tabel 4.11 Modalitas Indah Putri Indriani

No	Indikator	Uraian
1	Modal Sosial	<p>Modal sosial yang dimiliki Indah Putri Indriani pada Pilkada 2020 adalah, pertama interaksi sosial dengan masyarakat, Indah Indah Putri Indriani aktif dalam kegiatan dengan masyarakat. Kedua latar belakang pendidikan dan organisasi. Ketiga jaringan sosial atau relasi yang dimiliki sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas dukungan dalam pemenangan pilkada di Kabupaten Luwu Utara.</p>
2	Modal Ekonomi	<p>Modal ekonomi yang dimiliki Indah Putri Indriani adalah harta kekayaan dan dana kampanye. Modal ekonomi yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencalonannya dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara. Modal ekonomi Indah Putri Indriani yang begitu besar mampu memengaruhi kerja-kerja para relawan dan tim pemenangan lebih produktif dalam melakukan sosialisasi dan konsolidasi dukungan terhadap Indah Putri Indriani.</p>
3	Modal Simbolik	<p>Modal simbolik yang dimiliki Indah Putri Indriani pada pilkada 2020 adalah popularitas dan dukungan partai dan tokoh agama. Popularitas dan elektabilitas Indah Putri Indriani bukan hasil dari spontanitas selama satu atau dua</p>

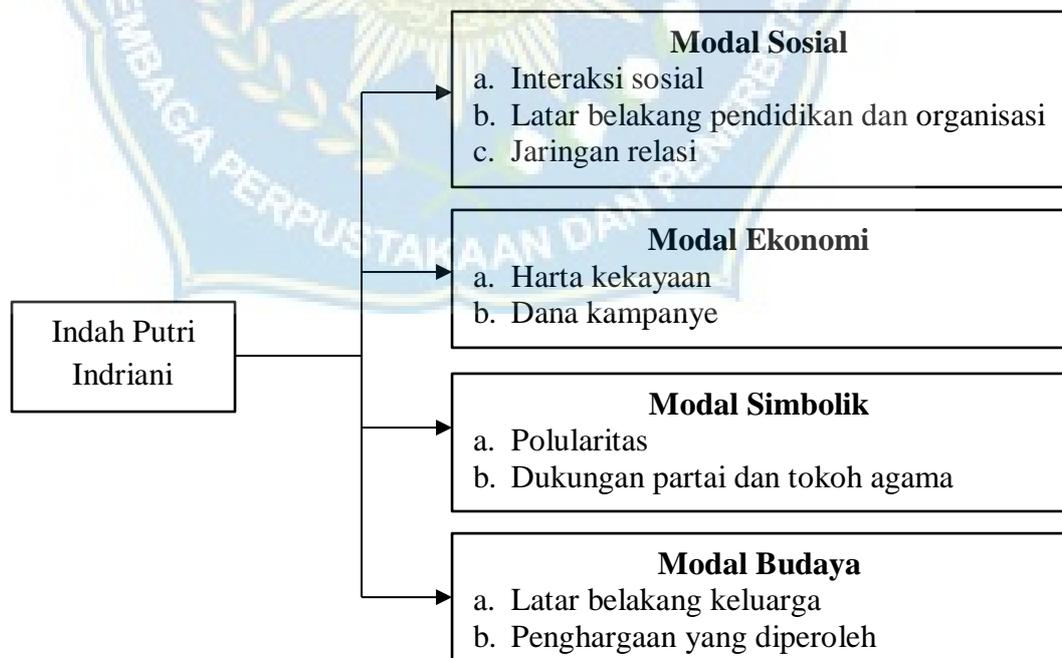
		bulan di Kabupaten Luwu Utara melainkan juga dari hasil dari jerih payah yang dilakukan. Dukungan partai dan tokoh agama kepada Indah Putri Indriani menjadikannya unggul. Terbukti bahwa modal popularitas membawa selangkah lebih maju dibandingkan calon-calon lainnya.
4	Modal Budaya	Modal budaya yang dimiliki Indah Putri Indriani adalah latar belakang keluarga dan penghargaan yang diterima. Modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani seperti latar belakang keluarga dan penghargaan-penghargaan atas prestasinya itu kemudian mampu dijadikan sebagai <i>brand marketing</i> pada saat sosialisasi dan saat kampanye, sehingga modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani dianggap mampu mempengaruhi calon pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.

Berdasarkan tabel analisa di atas terkait Modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020 diketahui bahwa Indah Putri Indriani dapat mengoptimalkan modalitas yang dimilikinya seperti modal sosial, ekonomi, simbolik dan budaya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Politik memiliki kekuatan guna menjadi daya tarik masyarakat di ranah tersebut. Perjuangan yang dilakukan para kandidat untuk menarik suara rakyat adalah upaya memperoleh modal atau kekuasaan agar bisa lebih dekat dengan hierarki tertentu. Dengan mempertahankan kedudukan, kandidat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan pemerintah demi terwujudnya kepentingan bersama. Strategi guna mempertahankan posisi seseorang dan memodifikasi distribusi modal dalam kaitannya dengan hierarki kekuasaan. Strategi yang digunakan didasarkan pada jumlah modal yang dimilikinya.

Agen dengan distribusi modal yang lebih besar mampu mengkonversi modalnya dan dapat memenangkan pertarungan begitupun sebaliknya. Modal yang dimiliki Inda Putri Indriani dijabarkan pada bagan dibawah sebagai berikut:



1. Modal Sosial

Modal sosial yang dimiliki Indah Putri Indriani dirasa cukup untuk menghantarkannya menduduki kursi kekuasaan dalam putaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu Utara. Diantaranya mempunyai interaksi sosial yang sangat baik, latar belakang pendidikan dan organisasi dalam komunitas dan mempunyai jaringan relasi yang kuat.

Indah Putri Indriani sangat dekat dengan masyarakat, pengalamannya dalam suatu organisasi atau komunitas membuatnya mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas. Keaktifannya dalam komunitas sehingga memiliki relasi yang besar. Modal inilah yang digunakan Indah Putri Indriani dalam pilkdad tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara. Hal ini sesuai pendapat Pierre Bourdieu (1986) dalam teorinya mengatakan bahwa modal sosial merupakan modal yang dimiliki oleh kandidat itu sendiri, dapat dilihat pada latar belakang sosialnya seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya didalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain-lain) untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Modal sosial menekankan pada jaringan hubungan sosial, dan menekankan pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

2. Modal Ekonomi

Modal ekonomi memiliki arti penting sebagai alat atau pelumas jalannya politik bagi para kandidat calon. Misalnya, saat musim kampanye banyak uang yang dibutuhkan untuk mencetak poster, spanduk, membayar iklan dan membiayai berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi

bisa menjadi kriteria terpenting jika seorang calon bukan dari partai yang diwakilinya.

Modal ekonomi yang dimiliki Indah Putri Indriani adalah harta kekayaan yang terdaftar di Elhkpn.kpk.go.id serta dana kampanye. Indah Putri Indriani adalah calon kepala daerah pada pilkada Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 yang memiliki harta kekayaan paling besar. Dana kampanye berasal dari donasi/sumbangan pribadi dan kelompok/ perseorangan untuk membantu para kandidat dalam menguatkan modal ekonominya. Hal ini sesuai pendapat Pierre Bourdieu (1986) dalam teorinya mengatakan bahwa modal ekonomi adalah adanya dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk pemenangan pilkada. Dana kampanye yang digunakan oleh kandidat atau partai politik dapat bersumber dari pasangan calon atau kandidat, partai politik atau gabungan partai politik serta sumbangan yang berasal dari individu, kelompok maupun badan hukum yang bersifat swasta.

3. Modal Simbolik

Modal simbolik yang dimiliki Indah Putri Indriani yaitu popularitas, dukungan partai politik dan tokoh agama yang mendampingi. Popularitas dan elektabilitas Indah Putri Indriani bukan hasil dari spontanitas selama satu atau dua bulan di Kabupaten Luwu Utara melainkan juga dari hasil dari jerih payah yang dilakukan. Popularitas Indah Putri Indriani tidak lepas dari perilaku sosialnya yang kuat dan dikenal dekat dengan masyarakat. Hal ini sesuai

pendapat Pierre Bourdieu (1986) dalam teorinya mengatakan bahwa salah satu bentuk modal simbolik adalah habitus yakni struktur kognitif yang memperantarai individu dengan realitas sosial yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu yang lainnya dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang social.

Selain itu dukungan dari maupun tokoh partai politik tokoh agama juga didapkannya, diantaranya dukungan Partai Golkar, PAN, Demokrat, PDI-P dan PPP sebagai partai yang mengusung dan membatu dalam mendampingi Indah Putri Indriani berkampanye dan beberapa tokoh agam di Kabupaten Luwu Utara. Banyaknya dukungan yang diterima dari segala aspek menjadikan Indah Putri Indriani semakin kuat dan mampu terpilih sebagai Bupati Luwu Utara tahun 2020-2025.

4. Modal Budaya

Modal budaya yang dimiliki Indah Putri Indriani adalah latar belakang keluarga dan penghargaan. Kedua orang tua dan suami Indah Putri Indriani juga memiliki andil yang besar dalam kemenangan Indah Putri Indriani dalam pilkada 2020 yang lalu, dimana dukungan ekonomi ataupun dana kampanye yang terdata di KPUD Kabupaten Luwu Utara atas nama Indah Putri Indriani, sebagian berasal dari dukungan dari kedua Orang Tua dan juga suami Indah Putri Indriani secara langsung. Latar belakang keluarga Indah Putri Indriani yang merupakan pendatang akhirnya juga mampu memobilisasi massa pemilih dari kalangan pendatang untuk mendukung Indah Putri Indriani pada Pilkada Luwu Utara 2020. Hal ini sesuai pendapat Pierre Bourdieu (1986)

dalam teorinya mengatakan bahwa modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya.

Selain itu, Indah Putri Indriani berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan, penghargaan tersebut diperoleh atas kontribusinya selama menjabat sebagai wakil bupati Luwu Utara, penghargaan tersebut diberikan Presiden RI berupa penghargaan Satya Lencana Panca tahun 2010, Satya Lencana Panca tahun 2013 dan Satya Lencana Darma tahun 2014. Penghargaan-penghargaan atas prestasinya itu kemudian mampu dijadikan sebagai *brand marketing* pada saat sosialisasi dan saat kampanye, sehingga modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani dianggap mampu mempengaruhi calon pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.

Penghargaan yang diperoleh Indah Putri Indriani tentu tidak lepas dari pengetahuan dan kemampuan beliau dalam berprestasi. Kemampuannya dalam memperoleh beberapa penghargaan tentu penilaian bagi dirinya dikalangan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dan menjadi pembeda dengan calon kandidat lainnya. Pierre Bourdieu (1986) dalam teorinya mengatakan bahwa modal budaya memiliki beberapa dimensi, salah satunya kemampuan-kemampuan budayami dan pengetahuan praktis, serta kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki Indah Indah Putri Indriani pada Pilkada 2020 adalah, pertama interaksi sosial dengan masyarakat, Indah Indah Putri Indriani aktif dalam kegiatan dengan masyarakat. Kedua latar belakang pendidikan dan organisasi. Ketiga jaringan sosial atau relasi yang dimiliki sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas dukungan dalam pemenangan pilkada di Kabupaten Luwu Utara. Modal ekonomi yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencalonannya dalam pilkada di kabupaten Luwu Utara. Modal ekonomi Indah Putri Indriani yang begitu besar mampu memengaruhi kerja-kerja para relawan dan tim pemenangan lebih produktif dalam melakukan sosialisasi dan konsolidasi dukungan terhadap Indah Putri Indriani. Modal simbolik berupa popularitas dan dukungan partai dan tokoh agama. Popularitas dan elektabilitas Indah Putri Indriani bukan hasil dari spontanitas selama satu atau dua bulan di Kabupaten Luwu Utara melainkan juga dari hasil dari jerih payah yang dilakukan. Dukungan partai dan tokoh agama kepada Indah Putri Indriani menjadikannya unggul. Terbukti bahwa modal popularitas membawa selangkah lebih maju dibandingkan calon-calon lainnya. Modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani seperti latar belakang keluarga ataupun penghargaan-penghargaan atas prestasinya itu kemudian mampu dijadikan sebagai *brand*

marketing pada saat sosialisasi dan saat kampanye, sehingga modal budaya yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani dianggap mampu memengaruhi calon pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020. Sehingga Indah Putri Indriani berhasil mengakumulasikan modalitas yang dimilikinya seperti modal sosial, ekonomi, simbolik dan budaya.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan agar masing-masing calon kepala daerah untuk bisa terbuka mengenai sumber dana kampanyenya, sehingga dikemudian hari dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti lainnya untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana kekuatan modalitas ekonomi dalam pilkada.
2. Dalam menjalankan kepemimpinannya, diharapkan Ibu Indah Putri Indriani sebagai Bupati perempuan pertama dalam sejarah Sulawesi Selatan diharapkan dapat membangun daerah Kabupaten Luwu Utara dengan gagasan baru agar bisa melakukan percepatan kemajuan daerah Luwu Utara.
3. Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, penulis berharap ada peneliti lainnya yang tertarik dan mencoba menganalisa modalitas dari seorang elit politik, dimana seorang elit politik mengambil peran untuk memenangkan calon kepala daerah dalam suatu kontestasi politik. Sehingga wacana tentang modalitas tidak hanya tertuju pada kontestan politik melainkan juga seorang elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, DI. 2019. "Kajian Umum Pilkada." *Africa's potential for the ecological intensification of agriculture* 53(9): 1689–99.
- Ariana. 2020. "Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Kandidat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(2): 408–20.
- Azed, Abdul Bari. 1987. "Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17(2): 170–80.
- Azhar, Muhammad Ali. 2014. "Modalitas Dalam Keterpilihan Kandidat Pada Pemilu Legislatif 2014." *Ocs.Unud.Ac.Id*: 1–10.
- Baharuddin, Tawakkal. 2017. "MODALITAS DALAM PILKADA: Bupati Perempuan Pertama Di Sulawesi Selatan." (May 2017): 128.
- Darmawan, Ferry. 2018. "Modalitas Visual Komunikasi Politik Iklan Pilkada Kota Bandung 2018." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11(1): 56–65.
- Dikriansyah, Fikri. 2018. "Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube." *Biomass Chem Eng* 3(2).
- Firdaus, A. Fiqi M. 2018. "Marketing Politik Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara." *Biomass Chem Eng* 3(2).
- Haryatmoko. 2003. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa." *Yayasan PB Basis*: 23.
- Irsat. 2018. "Peran Modal Dalam Pemasaran Politik Syamsari Kitta Dan Achmad Daeng Se're Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Jurdi, Syarifuddin. 2021. "Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Politik Profetik* 9(1): 23.
- Mei Mulyana, Andika. 2016. "Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa." *Repository.Unpas.Ac.Id*: 21–47.
- Patel. 2019. "Pemilihan Umum Dan Partai Politik." : 9–25.
- Pratiwi, Alfadillah Tri. 2021. "Modalitas Dalam Mengikuti Pemilu Legislatif 2019." 3(March): 6.
- Purwaningsih, Titin. 2017. "Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015." *Journal of Governance and Public Policy* 4(1): 205–37.

- Rasyid, Hatamar. 2017. *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat Dan Islam*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Selfiani, Selfiani, Mayong Maman, and Usman Usman. 2021. "Pertarungan Simbolik Dalam Slogan Pilkada Sulawesi Selatan Tahun 2020: Suatu Tinjauan Analisis Wacana Kritis Pierre Boudieu." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 17(2): 146–58.
- Tokan, Frans Bapa. 2019. "MODALITAS SOSIAL POLITIK: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) Pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019." *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan* 1(2): 181–98.
- Wanta, Resky Brando. 2018. "Modalitas Dan Strategi Kandidat Pada Pilkada Mitra 2018." *Biomass Chem Eng* 3(2).
- Wibowo, Ananda Rezky. 2017. "Perempuan Dan Kepemimpinan Politik."
- Winoto, Anggi Wahyu Pandu. 2017. "REPRODUKSI KEMISKINAN (Studi Reproduksi Kemiskinan Pada Komunitas Miskin Penghuni)."
- Zamrodah, Yuhanin. 2016. "Budaya Politik." 15(2): 1–23.



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP.,M.Si (Bupati Luwu Utara)



Wawancara dengan Suaib Masnyur, S.T.,M.Si (Wakil Bupati Luwu Utara)



Wawancara dengan Amrillah Todewi, SE (Sekretaris Jendral Praksi Golkar Kab. Luwu Utara)



Wawancara dengan Indra Wijaya Kusuma, A.Md.Par (Masyarakat)

01169


 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) - 21003 - Fax. (0473)-21536/22190
 www.luwu.tarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : YUSRIEL HAS	Diterima Tgl : 8 Mei 2023
No. Surat : 2993 / S.A / PISP / 2023	No. Agenda : 916
Tgl Surat : 21 - 02 - 2023	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Hal : 1214 penelitian	
Diteruskan kepada : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris Daerah <input type="checkbox"/> Asisten I <input type="checkbox"/> Asisten II <input type="checkbox"/> Asisten III <input type="checkbox"/> Kepala Dinas <input type="checkbox"/> Kepala Badan <input type="checkbox"/> Kepala Bagian 	Dengan hormat harap : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tanggapan <input type="checkbox"/> Koreksi/ Penyempurnaan <input type="checkbox"/> Laksanakan <input type="checkbox"/> Koordinasikan/ Konfirmasikan <input type="checkbox"/> Wakil/ Dampingi <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Proses sesuai ketentuan <input type="checkbox"/> Jadwalkan/ Laporkan <input type="checkbox"/> File/ simpan/ edarkan <input type="checkbox"/> Vide
 TL	Nama Jabatan Paraf dan tanggal


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 2993/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Luwu Utara
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 559/05/C.4-VIII/1444/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	YUSRIL HAS
Nomor Pokok	105641107418
Program Studi	Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	Mahasiswa (S1)
Alamat	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul

“ MODALITAS INDAH PUTRI INDRIANI DALAM PILKADA LUWU UTARA TAHUN 2020 ”

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Februari s/d 21 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Februari 2023

A. H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S. LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth.:

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringkat


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00495/00195/SKP/DPMPTSP/V/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Yusri Has beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/179/V/Bakesbangpol/2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Yusri Has
Nomor Telepon : 082187672149
Alamat : Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian : Modatitas Indah Putri Indriani Dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020
Lokasi Penelitian : Kantor Bupati Luwu Utara, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei s/d 09 Juni 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


H. AL-AUDDIN SUKRI, M.Si
NIP. : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00495


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)965588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 559/05/C.4-VIII/II/1444/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 Rajab 1444 H
 20 February 2023 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0298/FSP/A.1-VIII/II/1444H/2023M tanggal 16 Februari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YUSRIL HAS
 No. Stambuk : 10564 1107418
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Modalitas Indah Putri Indriani dalam Pilkada Luwu Utara Tahun 2020"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Februari 2023 s/d 24 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

 Dr. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

02-23

BAB IV Yusril Has 105641107418

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

21%

Exclude bibliography

On







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Yusril Has
NIM : 105641107418
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursur Alauddin, M.I.P.
NIM. 964 391

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Yusril Has 105641107418

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.unwira.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Magelang

Student Paper

2%

3

id.123dok.com

Internet Source

2%

4

journal.umy.ac.id

Internet Source

2%

5

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

2%

6

repository.iainambon.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography

BAB III Yusril Has 105641107418

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ut.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	3%
3	text-id.123dok.com Internet Source	3%

Exclude quotes Or Exclude matches -2%

Exclude bibliography Or

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

CC DigiDok.org Certified

RIWAYAT HIDUP



Yusril Has, Palopo 12 Oktober 1999, ke 2 dari 4 bersaudara, bapak Zubair Kadir dan Harmiati. 2005 SDN 092 Lindu, selesai pada tahun 2010, SMP di pesantren modern IMMIM putra Makassar selama 1 tahun dan di lanjut kan di SMP pesantren Datok Sulaiman Palopo, dan selesai pada tahun 2013, SMA di lanjutkan di SMA pesantren Datok Sulaiman Palopo selama 2 setengah Tahun, dan selesai di MAN Alya Negeri Masamba 1 tahun 2016, universitas Islam negeri Alauddin Makassar jurusan ilmu politik fakultas Ushuluddin filsafat dan politik selama 2 tahun dan melanjutkan di universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018 di jurusan ilmu pemerintahan fak ilmu sosial dan ilmu politik, lembaga PLC (pemilar learning center), IPMIL RAYA (ikatan pelajar mahasiswa Indonesia Luwu Raya) HMJ (himpunan mahasiswa jurusan) IMM (ikatan mahasiswa Muhammadiyah) ACT (aksi cepat tanggap). **“MODALITAS INDAH PUTRI INDRIANI DALAM PILKADA LUWU UTARA TAHUN 2020”**

Penulis sangat bersyukur atas atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah di berikan kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan semangat yang tinggi dan motivasi dari orang-orang sekitar, penulis berusaha dan belajar dengan baik hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di tahun 2023 dengan judul skripsi **“MODALITAS INDAH PUTRI INDRIANI DALAM PILKADA**

LUWU UTARA TAHUN 2020". Hingga Saat ini penulis mengharapkan dapat memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama mengamban pendidikan serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara

